

## SINERGITAS KELEMBAGAAN ANTAR UPTD DALAM PENANGANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN HEWAN: STUDI KASUS DI KELURAHAN CIPARI KABUPATEN KUNINGAN

NR.Ruyani<sup>1)\*</sup>, Ellya Susilowati<sup>2)</sup>, Lia Muliawaty<sup>3)</sup>, Cecep Nana Nasuha<sup>4)</sup>, Restu Wigati<sup>5)</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*ruyani@unpas.ac.id*

<sup>2</sup>Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*ellyasusilowati1@gmail.com*

<sup>3</sup>Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
*lia.muliawaty@unpas.ac.id*

<sup>4</sup>Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Indonesia  
*cephy.lucky81@gmail.com*

<sup>5</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia  
*restu.wigati@untirta.ac.id*

### ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan limbah Kotoran Hewan (Kohe) menjadi isu strategis dalam pembangunan peternakan berkelanjutan, khususnya di kawasan dengan konsentrasi populasi ternak yang tinggi, seperti Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas kelembagaan antar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Penanganan dan Pengelolaan limbah Kotoran Hewan (Kohe) di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan untuk menggali interaksi, koordinasi dan kolaborasi antar organisasi khususnya antara UPTD Peternakan dan UPTD Lingkungan Hidup dalam menjalankan kebijakan pengelolaan limbah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sinergitas kelembagaan belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya mekanisme pembiayaan bersama (*cost-sharing*). Meskipun terdapat upaya sporadis dalam membangun komunikasi antarlembaga, namun belum terintegrasi dalam sistem tata kelola kelembagaan yang holistik. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian tata kelola lingkungan lokal dengan menekankan pentingnya sinergitas antarlembaga operasional pemerintah dalam mengatasi tantangan pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Sinergitas Kelembagaan Pemerintah, Kolaborasi antar Organisasi, Pengelolaan Limbah Kohe

### ABSTRACT

*The problem of managing animal waste (Kohe) is a strategic issue in sustainable livestock development, especially in areas with high livestock population concentrations such as Cipari Village, Cigugur District, Kuningan Regency. This study aims to analyze the institutional synergy between Regional Technical Implementation Units (UPTD) in the handling and management of animal waste in Cipari Urban Village, Cigugur District, Kuningan Regency. A qualitative case study approach was used to explore the interactions, coordination, and inter-organizational collaboration between the Livestock UPTD and the Environmental UPTD in implementing waste management policies. The findings indicate that institutional synergy is not yet optimal due to weak cross-sector coordination, limited human resources, and the absence of a shared financing mechanism. Although sporadic efforts have been made to establish communication between agencies, they have not been integrated into a holistic*



*institutional governance system. This study offers a novel contribution to the field of local environmental governance by highlighting the importance of operational inter-agency synergy in addressing sustainable waste management challenges.*

**Keywords:** *Institutional Synergy Governance, Inter Organizational Collaboration, Manure Waste Management*

## **PENDAHULUAN**

Limbah adalah bahan organik atau anorganik yang tidak lagi digunakan sehingga dapat menyebabkan masalah lingkungan yang serius jika tidak dikelola secara persis. Limbah dapat berasal dari berbagai sumber limbah dari proses produksi, salah satunya adalah limbah Sapi. Limbah dapat datang dari rumah jagal hewan, menangani produksi ternak dan hasil kegiatan bisnis pertanian. Limbah ini dapat dalam bentuk limbah padat, cair dan gas, jika tidak dikelola, akan memiliki dampak negatif pada lingkungan. (Adityawarman, Salundik, Lucia, 2015). Di Kabupaten Kuningan, khususnya di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan produksi Kohe meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi ternak rakyat. Hal ini menuntut pengelolaan limbah yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga efisien secara kelembagaan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai perpanjangan tangan teknis pemerintah daerah memiliki peran vital dalam implementasi kebijakan pengelolaan Kohe. UPTD merupakan unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu pada perangkat daerah induknya (Permendagri 12/2017).

Sinergitas berasal dari kata sinergi. Sinergi diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan menghubungkan peran-peran penting berikut ini. Sinergi dapat dibangun dengan komunikasi dan koordinasi. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah harus bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan masyarakat. Sinergi merupakan proses penggabungan sejumlah kegiatan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "sinergi" dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Sinergi juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk kerjasama yang dihasilkan oleh kerjasama masing-masing pihak tanpa adanya kegagalan. Mengacu pada pengertian tersebut, maka ciri-ciri kekuatan sinergi adalah keberagaman atau perbedaan, bersifat seragam. Karena berlandaskan pada keberagaman atau perbedaan, maka kekuatan sintesis tersebut saling mengisi dan mengakhiri perbedaan tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih besar daripada penjumlahan bagian-bagiannya (Ali, Melys, Mardiana, 2020).

Sinergitas antarpemangku kepentingan dapat dipahami sebagai suatu hubungan yang berkesinambungan dari proses interaksi sosial yang dilandasi oleh rasa saling percaya, rasa saling efektif, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovasi sehingga terbentuklah kerjasama individu, kelompok atau organisasi yang ada pada level masyarakat dan mempunyai manfaat serta dampak yang penting dalam kegiatan proses pembangunan. Berdasarkan pengamatan awal dan dokumen kebijakan yang tersedia, sinergitas kelembagaan antara UPTD terkait masih berjalan secara sektoral dan belum terkoordinasi secara menyeluruh. Hal ini menghambat efektivitas pelaksanaan Program Penanganan Limbah Kohe yang seharusnya dikelola melalui pendekatan terintegrasi, partisipatif dan berbasis masyarakat. Kesenjangan antara regulasi, pelaksanaan teknis dan kapasitas kelembagaan menjadi faktor penghambat yang perlu ditelusuri secara mendalam. Kelurahan Cipari di Kecamatan Cigugur merupakan wilayah yang cukup aktif dalam kegiatan Peternakan Sapi Perah dan Sapi Potong. Aktivitas ini menyumbang jumlah limbah Kohe yang signifikan setiap harinya. Pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Peternakan dan UPTD Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam mendampingi masyarakat serta mengelola dampak lingkungan dari aktivitas peternakan tersebut.



Namun, implementasi di lapangan seringkali menemui kendala koordinasi dan lemahnya sinergi antarlembaga.

Limbah Kotoran Hewan (Kohe) merupakan salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan di sektor peternakan, khususnya di daerah yang memiliki konsentrasi populasi ternak yang tinggi, seperti Kabupaten Kuningan. Volume Kohe yang terus meningkat seiring pertumbuhan sektor peternakan memunculkan potensi pencemaran lingkungan apabila tidak dikelola secara tepat. Pengelolaan Limbah Kohe yang kurang optimal dapat berdampak pada pencemaran air tanah, bau tidak sedap, dan peningkatan gas rumah kaca. Berkaitan dengan permasalahan di atas, gap penelitian terletak pada kurangnya kajian mendalam tentang praktik sinergitas kelembagaan antar-UPTD di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pengelolaan Kohe. Penelitian di Trebengun (Lestari, Edahwati, Harya, 2024) dan CV Tiga Lima Jaya (Mutmainnah, Ibanah, Yanuarti, Luthfiyah, Fitriani, Harsanti, 2024) menunjukkan fokus pada aspek teknis pengolahan Kohe tanpa mengkaji model kolaborasi struktural antara UPTD peternakan, dinas lingkungan hidup dan BUMDes. Tidak ada indikator kinerja spesifik untuk menilai efektivitas sinergi kelembagaan. Tidak hanya itu, pelatihan mesin penghancur Kohe di CV Tiga Lima Jaya (Mutmainnah et.al., 2024) berhasil meningkatkan efisiensi teknis, namun tidak dikaitkan dengan peran kelembagaan dalam penyediaan infrastruktur atau alih teknologi. Studi di Trebengun (Lestari, et.al., 2024) juga tidak menyebutkan keterlibatan UPTD dalam pendampingan teknis berkelanjutan.

Penelitian terdahulu (Lestari, et.al. & Mutmainnah et.al., 2024) mengandalkan pendanaan proyek jangka pendek tanpa mengkaji mekanisme cost-sharing antarlembaga pemerintah, swasta dan masyarakat untuk Pengelolaan Kohe berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauhmana sinergi antar-UPTD di Kabupaten Kuningan telah terbentuk dan mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikannya. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena menyoroti aspek sinergitas antarlembaga pemerintah daerah di level operasional dalam Pengelolaan Limbah Kohe yang belum banyak diteliti sebelumnya. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada aspek Teknis Pengolahan Kohe atau studi dampak lingkungan, studi ini memberikan kontribusi pada ranah tata kelola kelembagaan lokal. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengungkap dinamika koordinasi dan kolaborasi antar UPTD dalam konteks lokal yang kompleks.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih untuk menggali secara mendalam proses sinergitas kelembagaan khususnya dinamika koordinasi dan kolaborasi antar-UPTD dalam pengelolaan limbah Kohe di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci dari UPTD Peternakan, UPTD Lingkungan Hidup serta pemerintah Kelurahan Cipari. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap lokasi pengelolaan Kohe dan kajian terhadap dokumen kebijakan yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Model Interaktif Miles dan Huberman (1994), meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sinergitas antar UPTD di Kabupaten Kuningan masih belum optimal dalam konteks Pengelolaan Limbah Kohe. Koordinasi antar lembaga masih berjalan secara sektoral dan belum terintegrasi dalam kerangka kelembagaan bersama. UPTD Peternakan



berfokus pada aspek teknis budidaya dan produksi, sedangkan UPTD Lingkungan Hidup lebih menyoroti aspek dampak lingkungan, namun belum ada forum koordinasi rutin yang memfasilitasi sinergi strategis. Ketidakhadiran mekanisme koordinasi formal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan, inkonsistensi pelaksanaan program, serta pemborosan sumber daya. Selain itu, tidak adanya visi bersama dalam Pengelolaan Limbah Kohe menghambat terciptanya model solusi yang holistik dan berkelanjutan. Padahal, persoalan limbah membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, mengingat dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan masyarakat, pertanian, dan ekonomi lokal. Selain itu, sinergitas antar lembaga dalam Pengelolaan Limbah Kohe di Kelurahan Cipari masih bersifat parsial. Setiap UPTD menjalankan fungsinya masing-masing tanpa adanya forum koordinasi yang reguler dan terstruktur. UPTD Peternakan lebih banyak berfokus pada aspek produksi dan teknis peternakan, sementara UPTD Lingkungan Hidup lebih concern pada penanganan dampak lingkungan tanpa integrasi program.

Berdasarkan wawancara dengan Pejabat Teknis UPTD Perikanan dan Peternakan diketahui, bahwa Pengelolaan Limbah Kohe lebih banyak diserahkan kepada peternak secara individu atau kelompok dan belum ada sistem manajemen limbah yang baku atau berbasis kawasan. Hal ini menyebabkan variasi dalam pengelolaan dan potensi pencemaran lingkungan yang tidak terpantau secara komprehensif. Ketergantungan pada pendekatan individual mencerminkan lemahnya intervensi kelembagaan dan absennya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam, baik dalam hal teknis pengolahan, pembuangan, maupun pemanfaatan limbah. Akibatnya, praktik pengelolaan limbah sangat bergantung pada kapasitas, kesadaran, dan sumber daya masing-masing peternak, yang tentu berbeda-beda. Dalam konteks lingkungan, hal ini berisiko menciptakan titik-titik pencemaran baru secara tersebar (non-point source pollution), yang sulit dideteksi dan ditangani secara cepat. Selain itu, tidak adanya sistem berbasis kawasan menghambat potensi ekonomi sirkular dari limbah Kohe, seperti pemanfaatan kolektif untuk produksi kompos, biogas atau energi terbarukan. Tanpa kerangka tata kelola kolektif, maka limbah akan terus dipandang sebagai beban, bukan sebagai sumber daya yang bernilai. Di sisi lain, UPTD Lingkungan Hidup menyatakan telah melakukan sosialisasi terkait pengelolaan limbah organik dan pemanfaatannya sebagai pupuk kompos. Namun, keterbatasan anggaran dan personel menjadi kendala utama dalam pengawasan dan pendampingan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Kondisi ini menunjukkan, adanya kesenjangan antara kebijakan teknis dan implementasi di lapangan, di mana upaya peningkatan kesadaran lingkungan tidak diimbangi dengan dukungan sumber daya yang memadai. Tanpa kehadiran pengawasan yang konsisten, masyarakat cenderung kembali pada pola pengelolaan limbah konvensional yang kurang ramah lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pihak swasta dalam menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan..

Minimnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga juga terlihat dari tidak adanya data terpadu terkait jumlah produksi limbah Kohe, kapasitas pengolahan, dan distribusi pemanfaatan hasil olahan. Hal ini menghambat perencanaan dan evaluasi kebijakan berbasis data. Salah satu petugas lapangan menyebutkan bahwa belum ada platform atau sistem informasi bersama antar instansi yang dapat digunakan untuk berbagi data dan program kerja. Komunikasi antar lembaga dan organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan harus dapat menyampaikan maksud dan tujuan dari bentuknya sebuah kebijakan. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain (Mariane, et. al, 2025). Beberapa kelompok ternak telah melakukan inisiatif Pengolahan Limbah Kohe secara mandiri, seperti membuat biogas dan kompos, namun kegiatan ini belum mendapatkan pendampingan teknis yang optimal dari pemerintah daerah. Potensi inovasi lokal ini belum terintegrasi dalam kebijakan kelembagaan yang lebih luas. Kondisi ini mencerminkan lemahnya mekanisme bottom-up dalam perumusan kebijakan lingkungan, di mana inovasi dari akar rumput tidak diakomodasi



secara strategis dalam perencanaan dan dukungan pemerintah. Ketidakterlibatan pemerintah dalam mengoptimalkan potensi lokal ini berisiko membuat inisiatif mandiri bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan. Padahal, jika dikembangkan melalui pendekatan kolaboratif dan dukungan regulasi, praktik ini dapat menjadi model pengelolaan limbah yang efisien, partisipatif, dan sesuai dengan konteks lokal. Penelitian ini menemukan, bahwa akar permasalahan dari lemahnya sinergitas adalah tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuningan yang secara khusus mengatur mekanisme koordinasi antar UPTD dalam Penanganan Limbah Kohe. Dengan tidak adanya payung hukum yang mengikat, maka kerjasama antarlembaga hanya bersifat informal dan bergantung pada inisiatif personal. Situasi ini menciptakan ketidakpastian institusional dan melemahkan tata kelola lintas sektor karena tidak adanya kejelasan peran, tanggung jawab dan alur koordinasi antarunit. Ketergantungan pada hubungan personal juga membuat upaya penanganan limbah menjadi rentan terhadap perubahan struktur birokrasi dan pergantian pejabat. Tanpa regulasi yang jelas, kebijakan dan program yang dihasilkan cenderung fragmentaris, tidak konsisten serta sulit untuk dievaluasi dan direplikasi secara sistematis. Oleh karena itu, urgensi penyusunan regulasi formal menjadi krusial untuk mendorong sinergitas kelembagaan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan dokumen-dokumen Kebijakan Penanganan dan Pengelolaan Limbah Kotoran Peternakan menunjukkan adanya celah dalam kerangka regulasi lokal yang menyebabkan tumpang tindih tugas dan lemahnya pelaksanaan di lapangan. Di sisi lain, inisiatif pemerintah kelurahan dalam menjembatani komunikasi antar UPTD menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di wilayah lain. Penelitian ini menegaskan pentingnya membentuk Satuan Tugas Lintas-UPTD dalam mengelola Kohe secara berkelanjutan dan berbasis komunitas. Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan UPTD). Dalam konteks pengelolaan limbah kotoran hewan di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, terdapat beberapa UPTD yang memiliki posisi strategis, yaitu UPTD Perikanan dan Peternakan, UPTD Lingkungan Hidup, UPTD Ketahanan Pangan, dan UPTD Pertanian.

UPTD Perikanan dan Peternakan bertugas memberikan pembinaan dan layanan teknis kepada para peternak lokal, termasuk dalam Pengolahan Kohe menjadi pupuk organik dan biogas, yang sangat relevan dengan kegiatan Peternakan Sapi Perah di Cipari. UPTD Lingkungan Hidup berperan dalam pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas peternakan serta mendorong penerapan prinsip ekologi dalam pemanfaatan limbah ternak. UPTD Ketahanan Pangan dan Pertanian berkontribusi dalam menjaga kesinambungan sistem pangan daerah, dengan mendorong pemanfaatan Kohe sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu dan berkelanjutan. Serta mendukung penggunaan Kohe sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kualitas lahan pertanian di sekitar Cipari, sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia sintetis.

Sinergitas keempat kelembagaan UPTD ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Sistem Pengelolaan Kohe yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan. Di Kelurahan Cipari, yang memiliki potensi peternakan dan pertanian yang cukup besar, kolaborasi antar-UPTD tersebut dapat menghasilkan model pengelolaan limbah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya koordinasi kelembagaan secara formal, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian lintas sektor serta belum adanya forum tetap untuk merancang dan mengevaluasi program bersama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui Pembentukan Forum Koordinasi Lintas-UPTD di tingkat Kecamatan Cigugur serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu yang melibatkan masyarakat, pemerintah kelurahan dan pelaku usaha lokal secara aktif. Langkah ini akan mendorong Pengelolaan Kohe menjadi bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.



Temuan ini sejalan dengan kajian-kajian, pertama, kelembagaan UPTD harus mampu menjalankan fungsinya dalam merancang dan mengimplementasikan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat (Hadi, Suroso, Wijaya, Jalil, 2021). Kedua, Kelembagaan UPTD harus mampu berperan dalam mengelola sumber daya dan memfasilitasi kolaborasi antarpelaku usaha peternakan, pemerintah daerah dan masyarakat untuk pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi dari limbah kotoran ternak (Kusuma, 2021). Dan ketiga, Sinergitas UPTD harus dapat melakukan pendampingan yang komprehensif dalam meningkatkan tingkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis para peternak yang dapat memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan limbah kotoran ternak dalam mencegah pencemaran lingkungan. Ini menunjukkan pentingnya peran kelembagaan dalam memberikan pendampingan dan edukasi teknis kepada peternak (Linggotu, Paputungan, Polii, 2016). Oleh karena itu, hasil penelitian ini menyarankan pentingnya pembentukan tim koordinasi lintas UPTD yang difasilitasi oleh pemerintah daerah serta Penyusunan *Roadmap* Pengelolaan Limbah Kohe berbasis kawasan. Pendekatan kolaboratif ini juga perlu melibatkan masyarakat, akademisi dan sektor swasta agar terwujud model pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan berdaya guna di Kabupaten Kuningan. Dengan koordinasi dan kolaborasi dapat mensinergikan perbedaan tujuan dan kepentingan serta mengatasi kesulitan dalam menyeimbangkan peran masing-masing pihak. Selain kebijakan/peraturan, dapat menghasilkan adanya kemudahan akses yang memadai terhadap sumber daya, seperti dana, infrastruktur dan tenaga ahli (Dewi, Suryana, 2024). Pembentukan tim koordinasi dan penyusunan *roadmap* bukan hanya menjadi langkah administratif, melainkan merupakan fondasi strategis untuk membangun tata kelola yang terstruktur, terukur dan responsif terhadap dinamika lokal. Pelibatan multipihak akan memperkuat legitimasi program, memperluas sumber daya, serta membuka ruang inovasi melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi. Tanpa kerangka koordinasi yang jelas dan partisipatif, upaya pengelolaan limbah akan terus bersifat sektoral dan terfragmentasi, sehingga potensi ekonomi dan lingkungan dari pengelolaan limbah Kohe tidak akan optimal.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa sinergitas kelembagaan antar-UPTD di Kelurahan Cipari dalam Pengelolaan Limbah Kohe masih belum berjalan optimal. Faktor-faktor penghambat utama adalah minimnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme pendanaan bersama yang jelas. Terdapat celah antara regulasi dan pelaksanaan teknis di lapangan, yang mengakibatkan program pengelolaan limbah berjalan secara parsial dan tidak berkelanjutan. Diperlukan penguatan kerangka kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan mekanisme kerjasama lintas UPTD serta integrasi peran masyarakat dan sektor swasta. Ke depan, Pengelolaan Limbah Kohe perlu diarahkan pada tata kelola kolaboratif yang berbasis pada prinsip partisipatif, integratif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adityawarman, A.C, Salundik, Lucia. (2015). Pengolahan Limbah Ternak Sapi Secara Sederhana di Desa Pattalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan*, 3(3): 171-177
- Ali, Melys H., Andi Mardiana. (2022). Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Mutawazzin : *Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i2.162>

- Dewi, I. G. A. Y., & Suryana, I. N. M. (2024). KOLABORASI TRIPLE HELIX DALAM PROGRAM INOVASI DESA (Studi Kasus: Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2). DOI: <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.13762>
- Hadi, S., Suroso, B., Wijaya, I., & Jalil, A. (2021). Pendampingan Pengelolaan Kotoran Hewan Menjadi Pupuk Organik Dan Biogas Di Dusun Tetelan Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 2(2), 64-72.
- Kusuma, D. T. P. (2017). ANALISIS NILAI TAMBAH PRODUKSI LIMBAH KOTORAN TERNAK RUMAH POTONG HEWAN KOTA PEKANBARU. *JOM Fekon*, 4(1).
- Lestari, W. D., Edahwati, L., & Harya, G. I. (2024). PELATIHAN PENGOPERASIAN ALAT PENGHANCUR DAN PENGADUK KOTORAN HEWAN (KOHE) TERINTEGRASI DI CV TIGA LIMA JAYA DESA JAJAR GUMREGAH. *JURNAL ABDI INSANI*, 11(4): 1-10. DOI: <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1789>
- Linggotu, L. O., Paputungan, U., & Polii, B. (2016). PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN TERNAK DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA KOTAMOBAGU. *Jurnal ZooteK*, 36(1), 226-237. DOI: <https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10535>
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN ANTAPANI TENGAH KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v16i01.9934>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Mutmainnah, L., Ibanah, I., Yanuarti, R., Luthfiyah, L., Fitriani, V., & Harsanti, R. S. (2024). PERCEPATAN PENGELOLAAN LIMBAH KOTORAN SAPI MENJADI KOMPOS TERSTANDAR. *Jurnal Pengabdian NUSANTARA (JPN)* Universitas Halu Oleo, 4(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.33772/jpnus.v4i1.3>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.